

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMIGRASI ILEGAL: ANALISIS PERATURAN DAN TANTANGAN DI INDONESIA

Ayu Wulandari *¹

Marnia Rani ²

Sherly Meliana ³

Wiwin Marisa ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail : ayuw2643@gmail.com¹, marniarani@umrah.ac.id², Sherlymeliana0@gmail.com³,
wiwinmarisa43@gmail.com ⁴

Abstrak

Penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan meskipun telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, seperti diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani imigrasi ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dengan baik, implementasinya di lapangan masih terbatas oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, serta tantangan birokrasi dan hukum. Tantangan lainnya termasuk pengawasan perbatasan yang luas dan sulit dijangkau, serta tekanan sosial dan ekonomi baik dari dalam negeri maupun dari negara asal imigran ilegal. Rekomendasi yang diusulkan mencakup peningkatan kapasitas dan sumber daya, penguatan koordinasi antar lembaga, perbaikan sistem hukum dan administrasi, serta pendekatan multidimensi yang melibatkan kerjasama internasional. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal dan menciptakan sistem keimigrasian yang lebih adil dan efisien.

Kata Kunci : Imigrasi ilegal, penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, tantangan, Indonesia

Abstract

The enforcement of laws against illegal immigration in Indonesia faces numerous challenges despite having a comprehensive legal framework as outlined in Law No. 6 of 2011 on Immigration. This study aims to analyze the effectiveness of regulations and identify the main challenges faced by law enforcement and the government in addressing illegal immigration. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature review, legal document analysis, in-depth interviews, and observations. The findings reveal that although the legal regulations are well established, their implementation in the field is hindered by limited resources, suboptimal inter-agency coordination, and bureaucratic and legal challenges. Other challenges include the vast and difficult-to-monitor borders, as well as social and economic pressures both domestically and from the immigrants' countries of origin. The proposed recommendations include increasing capacity and resources, strengthening inter-agency coordination, improving legal and administrative systems, and adopting a multidimensional approach involving international cooperation. It is hoped that these measures will enhance the effectiveness of law enforcement against illegal immigration in Indonesia and create a more just and efficient immigration system.

Keywords: Illegal immigration, law enforcement, regulations, challenges, Indonesia

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal merupakan isu yang semakin relevan dan kompleks dalam konteks globalisasi dan mobilitas manusia yang meningkat¹ (Mulyawan dan Santy, 2024). Di Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis, tantangan dalam mengelola

¹ Mulyawan, B., & Santy, Y. N. (2024). COMPARATIVE ANALYSIS OF IMMIGRATION ADMINISTRATIVE ACTIONS BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA. *Journal of Administration and International Development*, 4(1), 1-17.

imigrasi ilegal menjadi semakin signifikan. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menjadi tujuan, transit, dan asal bagi banyak imigran, baik legal maupun ilegal. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada keamanan nasional, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Imigrasi ilegal didefinisikan sebagai masuknya individu atau kelompok ke wilayah suatu negara tanpa izin resmi atau melalui jalur yang tidak sah. Praktik ini melibatkan berbagai modus operandi, mulai dari pemalsuan dokumen, penyelundupan manusia, hingga penyeberangan perbatasan secara ilegal. Dalam konteks Indonesia, wilayah perbatasan yang luas dan sulit diawasi menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal. Indonesia, sebagai anggota dari berbagai konvensi internasional terkait hak asasi manusia dan pengungsi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan imigrasi tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta tantangan hukum dan birokrasi (Hariati dan Triadi, 2024)² Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang imigrasi di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Sumolang, 2020)³. UU ini memuat berbagai ketentuan mengenai masuk, tinggal, dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, serta sanksi bagi pelanggaran aturan tersebut. Selain itu, terdapat juga berbagai peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung implementasi UU Keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengatasi imigrasi ilegal, serta mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dalam menanggulangi imigrasi ilegal di Indonesia?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal di Indonesia, dan bagaimana cara mengatasinya?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi dan memahami efektivitas peraturan perundang-undangan serta tantangan dalam penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal di Indonesia (Tampubolon, 2023). Metode ini dipilih karena memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam fenomena yang kompleks dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan dan regulasi diimplementasikan serta bagaimana tantangan di lapangan dihadapi oleh berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini juga membantu dalam mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mungkin tidak terlihat melalui metode kuantitatif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan situasi, kebijakan, dan tantangan yang ada, serta menganalisis data yang diperoleh untuk memahami lebih lanjut mengenai isu yang diteliti. Metode ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasi data untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan yang relevan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu studi pustaka, analisis dokumen huku. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi

² Hariati, R., & Triadi, I. (2024). TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI KAWASAN PERBATASAN LAUT INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(1), 55-65.

³ Sumolang, A. Z. Z. (2020). Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 8(2).

dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Studi pustaka ini bertujuan untuk memahami kerangka teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, serta untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang dapat memberikan konteks atau referensi bagi penelitian ini. Sedangkan analisis dokumen hukum dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan imigrasi di Indonesia, terutama Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya. Analisis ini bertujuan untuk memahami ketentuan hukum yang ada, mengevaluasi efektivitasnya, serta mengidentifikasi kelemahan atau celah hukum yang mungkin ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam Menanggulangi Imigrasi Ilegal di Indonesia

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan kerangka hukum utama yang mengatur masuk, tinggal, dan keluar orang asing di Indonesia (Hamidi dan Christian, 2021)⁴. UU ini mengandung berbagai ketentuan yang dirancang untuk mencegah dan mengatasi imigrasi ilegal, termasuk persyaratan visa, izin tinggal, serta sanksi bagi pelanggaran.

Prosedur Masuk dan Tinggal

- Peraturan perundang-undangan mengatur prosedur masuk dan tinggal orang asing dengan cukup rinci. Ada persyaratan ketat mengenai visa dan izin tinggal yang harus dipenuhi oleh orang asing yang ingin masuk atau tinggal di Indonesia. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana orang asing berhasil masuk tanpa memenuhi persyaratan ini, sering kali melalui jalur tidak resmi.

Sanksi dan Penegakan Hukum

- UU Keimigrasian menetapkan sanksi bagi berbagai pelanggaran, termasuk masuk atau tinggal tanpa izin, penyalahgunaan izin tinggal, dan pemalsuan dokumen. Sanksi ini mencakup denda, deportasi, dan hukuman penjara. Namun, penegakan sanksi ini sering kali tidak konsisten, terutama di wilayah perbatasan yang sulit diawasi.

Koordinasi Antar Lembaga

- Efektivitas peraturan juga tergantung pada koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum imigrasi, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Meski telah ada upaya untuk meningkatkan koordinasi melalui berbagai forum dan mekanisme, tantangan birokrasi dan perbedaan kepentingan antar lembaga sering menghambat implementasi kebijakan secara efektif.

Keterlibatan Teknologi

- Penggunaan teknologi informasi dalam sistem keimigrasian, seperti e-visa dan biometrik, telah membantu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengoperasikan sistem ini secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk menanggulangi imigrasi ilegal, efektivitasnya masih terbatas oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan dalam implementasi, kurangnya sumber daya, dan tantangan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum dan meningkatkan kapasitas serta koordinasi antar lembaga terkait.

2. Tantangan Utama dalam Penegakan Hukum Terhadap Imigrasi Ilegal di Indonesia

⁴ Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.

Penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks (Restanto dan Pangestika, 2023)⁵. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini:

Tantangan Pengawasan Perbatasan

- **Wilayah Perbatasan yang Luas dan Sulit Dijangkau** Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan terdiri dari ribuan pulau, yang membuat pengawasan perbatasan menjadi sangat menantang. Banyaknya titik masuk tidak resmi yang sulit diawasi oleh aparat penegak hukum menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka imigrasi ilegal.
- **Keterbatasan Sumber Daya** Pengawasan yang efektif membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dalam hal personel, peralatan, maupun teknologi. Namun, keterbatasan anggaran dan fasilitas sering kali menghambat kemampuan aparat untuk mengawasi perbatasan dengan efektif.

Tantangan Hukum dan Birokrasi

- **Kelemahan dalam Sistem Hukum** Meskipun UU Keimigrasian telah mengatur sanksi bagi pelanggaran, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak konsisten. Celah hukum dan praktik korupsi di beberapa wilayah perbatasan juga turut menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.
- **Birokrasi yang Rumit** Prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks sering kali menghambat penanganan kasus-kasus imigrasi ilegal. Hal ini mencakup proses administrasi yang lambat dan kurangnya transparansi dalam penanganan kasus.

Tantangan Sosial dan Ekonomi

- **Tekanan Sosial dan Ekonomi** Banyaknya imigran ilegal yang datang ke Indonesia sering kali disebabkan oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi di negara asal mereka, seperti konflik, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik. Tekanan ini menciptakan arus migrasi yang sulit dikendalikan hanya dengan penegakan hukum.
- **Pengaruh Sosial** Di beberapa daerah, masyarakat lokal memiliki hubungan baik dengan imigran ilegal, yang dapat menghambat upaya penegakan hukum. Dukungan atau simpati dari masyarakat setempat terhadap imigran ilegal sering kali mempersulit tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Upaya untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya

- Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan teknologi untuk pengawasan perbatasan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum juga harus menjadi prioritas.

Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum imigrasi melalui pembentukan satuan tugas khusus atau forum koordinasi reguler. Ini termasuk berbagi informasi dan data secara lebih efektif.

Perbaikan Sistem Hukum dan Administrasi

- Reformasi dalam sistem hukum dan birokrasi untuk mengurangi celah hukum dan mempercepat proses administrasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus imigrasi ilegal juga harus ditingkatkan untuk mengurangi praktik korupsi.

Pendekatan Multidimensi

⁵ Restanto, A. D., & Pangestika, E. Q. (2023). Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 14856-14864.

- Mengatasi imigrasi ilegal memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga menangani akar penyebab migrasi, seperti ketidakstabilan sosial dan ekonomi di negara asal imigran. Kerjasama internasional dalam menangani isu ini juga sangat penting.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, penelitian ini mengungkap bahwa penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang kompleks meskipun telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk mengatur masuk, tinggal, dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran aturan tersebut. Namun, efektivitas peraturan ini masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, serta kelemahan dalam implementasi dan pengawasan di lapangan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi pengawasan perbatasan yang luas dan sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya, kelemahan dalam sistem hukum dan birokrasi, serta tekanan sosial dan ekonomi baik dari dalam negeri maupun dari negara asal para imigran ilegal. Selain itu, praktik korupsi dan simpati masyarakat lokal terhadap imigran ilegal juga menambah kompleksitas dalam penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal, diperlukan upaya menyeluruh yang melibatkan peningkatan kapasitas dan sumber daya, penguatan koordinasi antar lembaga, perbaikan sistem hukum dan administrasi, serta pendekatan multidimensi yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata tetapi juga menangani akar penyebab migrasi. Peningkatan investasi dalam infrastruktur dan teknologi pengawasan perbatasan, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum, menjadi prioritas penting. Koordinasi yang lebih baik antar lembaga melalui pembentukan satuan tugas khusus dan forum koordinasi reguler juga diperlukan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum. Di samping itu, reformasi dalam sistem hukum dan birokrasi untuk mengurangi celah hukum dan mempercepat proses administrasi, serta transparansi dalam penanganan kasus imigrasi ilegal, perlu ditingkatkan. Pendekatan yang holistik dan kerjasama internasional juga penting untuk menciptakan sistem keimigrasian yang lebih adil dan efisien. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi imigrasi ilegal secara lebih efektif dan berkontribusi pada keamanan serta stabilitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hariati, R., & Triadi, I. (2024). TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI KAWASAN PERBATASAN LAUT INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(1), 55-65.
- Mulyawan, B., & Santy, Y. N. (2024). COMPARATIVE ANALYSIS OF IMMIGRATION ADMINISTRATIVE ACTIONS BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA. *Journal of Administration and International Development*, 4(1), 1-17.
- Restanto, A. D., & Pangestika, E. Q. (2023). Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 14856-14864.
- TAMPUBOLON, C. N. (2023). *ANALISIS YURIDIS PERAN INTELKAM POLDA KEPRI DALAM MENGIDENTIFIKASI ANCAMAN TANTANGAN HAMBATAN GANGGUAN KAMTIBMAS GUNA MENEGAKKAN KEPASTIAN HUKUM* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sumolang, A. Z. Z. (2020). Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 8(2).